

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia di tahun 2023 telah mencapai 78,19 persen. Ini berarti sekitar 215.626.156 orang dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa telah terhubung ke internet. Akan tetapi, Hal ini tidak di dibarengi dengan kualitas literasi digital masyarakat Indonesia. Di awal tahun 2023, tingkat literasi digital di Indonesia tercatat hanya mencapai 62%, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN lainnya yang berada di kisaran 70% (CNBC Indonesia, 2023). Rendahnya tingkat literasi digital ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemahaman dan keterampilan digital masyarakat Indonesia, yang juga mengindikasikan perlunya peningkatan akses, edukasi, dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengejar ketertinggalan tersebut di tingkat regional.

Literasi digital menjadi isu baru dalam hubungan internasional modern karena berkaitan dengan berbagai aspek kritis, seperti ketimpangan akses teknologi, ancaman cybersecurity, dinamika kekuatan geopolitik, dan ketergantungan negara pada teknologi. Menurut Nashihuddin, (2020) literasi digital didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan media digital, alat komunikasi, atau jaringan guna mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi. Hal ini dilakukan dengan cara yang sehat, bijaksana,

cerdas, cermat, tepat, dan sesuai dengan hukum, sehingga dapat mendukung komunikasi dan interaksi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan literasi digital. Sebagai kota pendidikan yang dikenal dengan keberadaan berbagai universitas ternama, DIY memiliki sumber daya manusia yang unggul dan infrastruktur pendidikan yang mendukung. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pendidikan masyarakat DIY termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia, dengan angka melek huruf mencapai lebih dari 97% (BPS DIY, 2023). Hal ini memberikan landasan kuat bagi DIY untuk mendorong peningkatan literasi digital melalui integrasi teknologi dalam sektor pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Sebagai pusat pendidikan nasional, DIY dikenal sebagai “kota pelajar” dengan ribuan mahasiswa yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara. Keberadaan institusi pendidikan tinggi yang unggul tidak hanya mendukung pengembangan sumber daya manusia berkualitas tetapi juga menciptakan peluang untuk inovasi teknologi dan riset berbasis digital. Selain itu, DIY memiliki ekosistem ekonomi kreatif yang dinamis, mencakup sektor teknologi informasi, seni digital, dan startup. Ekosistem ini menjadi katalisator dalam mendorong adopsi teknologi digital di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Lebih jauh lagi, pemerintah DIY menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung transformasi digital melalui inisiatif strategis seperti “*Jogja Smart Province*,” yang bertujuan meningkatkan konektivitas internet dan penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Kombinasi antara sumber daya manusia unggul, ekosistem

kreatif yang berkembang, dan kebijakan pemerintah yang progresif menjadikan DIY sebagai wilayah dengan potensi besar untuk memimpin literasi digital di Indonesia dan menjadi contoh bagi daerah lain.

Untuk membantu mengatasi isu literasi digital, Pemerintah DIY kemudian mengadopsi strategi paradiplomasi, yaitu keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional untuk mencapai tujuan lokal. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan kualitas literasi digital masyarakat, dengan mengandalkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan aktor-aktor non-negara, seperti Organisasi Non-Pemerintah (NGO). Kolaborasi lintas sektor ini menjadi sarana penting untuk mengintegrasikan berbagai perspektif, sumber daya, dan keahlian dari sektor publik, swasta, dan komunitas masyarakat dalam menyelesaikan tantangan multidimensi (Rogers, 2023). Paradiplomasi juga memfasilitasi pemanfaatan sumber daya global untuk mendukung upaya lokal. Sebagai contoh, kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat pengadaan infrastruktur digital, mengurangi kesenjangan teknologi, dan meningkatkan akses masyarakat ke layanan digital yang berkualitas. Dengan adanya koordinasi yang efektif antar berbagai aktor, paradiplomasi dapat mengubah tantangan menjadi peluang, sehingga bukan lagi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan pemerintah pusat, melainkan sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini, pemerintah daerah tidak hanya memperkuat kapasitas internal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan hubungan antar negara melalui diplomasi berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional, yaitu sebagai alat (instrumen), tempat berlangsungnya interaksi, serta sebagai aktor mandiri yang memiliki peran independen (Shotwell, 1940). Williams Cousins dalam *Non Governmental Initiative* menjelaskan lebih lanjut mengenai organisasi non-pemerintah (NGO) yang dapat berfungsi sebagai penyedia infrastruktur yang vital bagi masyarakat. Dalam konteks ini, "infrastruktur" tidak hanya mengacu pada fasilitas fisik, tetapi juga mencakup berbagai layanan, sumber daya, dan inisiatif yang diperlukan untuk memberdayakan komunitas. Salah satu NGO yang melaksanakan fungsi tersebut di Indonesia adalah Singapore International Foundation (SIF), SIF mencerminkan peran tersebut dengan fokus pada mempromosikan kerja sama internasional dan berperan secara signifikan dalam upaya peningkatan transformasi sosial di berbagai sektor kehidupan.

SIF berekspansi ke Indonesia untuk memperluas jaringan internasionalnya sekaligus memperkuat hubungan bilateral dan mempromosikan kerja sama lintas batas. Organisasi ini berfokus pada empat sektor yaitu *Arts & Culture, Business & Livelihood, Education, dan Healthcare*. Keberadaan keempat sektor ini mendukung pencapaian tujuan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Secara khusus, SIF berkontribusi pada *Goal 3* yang bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik, *Goal 4* yang berfokus pada pendidikan berkualitas, *Goal 6* mengenai ketersediaan akses air bersih dan sanitasi, serta *Goal 17* yang menekankan pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan pendekatan yang holistik ini, organisasi berusaha untuk menciptakan dampak

positif yang signifikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat (*Singapore International Foundation, 2020, p. 2*).

Dalam mewujudkan *Goal SDGs* ke 4, SIF melihat adanya tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Padahal literasi digital merupakan aspek krusial dalam pendidikan abad ke-21 yang tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan kritis dan analitis dalam memanfaatkan teknologi digital. Hal ini kemudian menjadi peluang bagi SIF untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat Indonesia. Kerja sama ini juga didorong oleh visi SIF untuk menciptakan perubahan sosial yang positif melalui kolaborasi internasional, di mana para sukarelawan Singapura berbagi keahlian dan pengalaman mereka dalam bidang teknologi digital. Selama bertahun-tahun, SIF bekerja sama dengan berbagai NGO lokal Indonesia, lembaga pemerintah, dan institusi pendidikan. SIF kemudian meluncurkan lebih banyak inovasi program yang berkontribusi dalam memperkuat kapasitas masyarakat lokal untuk pembangunan yang berkelanjutan.

SIF memiliki dua kegiatan utama yang saling terhubung. Pertama, memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui mobilisasi berbagai sumber daya. Dalam konteks literasi digital, SIF menghimpun dana dari donatur dan mengundang relawan dari seluruh dunia untuk mengadakan lokakarya serta pelatihan. Program-program ini bertujuan mengajarkan keterampilan dasar dalam penggunaan komputer, pemanfaatan internet, serta cara mengakses dan menilai informasi digital. Selain meningkatkan kemampuan teknis, program ini juga mendorong rasa percaya diri peserta dalam memanfaatkan teknologi. Kedua, SIF

berperan sebagai advokat kebijakan dan juru kampanye publik untuk mewujudkan transformasi sosial (Willetts, 2010) Melalui kampanye publik yang menyoar berbagai segmen masyarakat, SIF mengedukasi komunitas tentang pentingnya literasi digital dan mendukung pengembangan keterampilan di bidang tersebut. Dalam praktiknya, SIF bermitra dengan sekolah dan komunitas lokal untuk mengadakan pelatihan dan lokakarya yang relevan.

Inisiatif kerjasama yang dilakukan oleh SIF dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di bidang pendidikan dilaksanakan melalui program *Words on Wheel* (WoW). Program WoW ini diresmikan di DIY pada tanggal 13 November 2017 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan antara SIF dan Pemerintah DIY di Gedung Perpustakaan Grahatama Pustaka. Selain itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui program yang difasilitasi oleh Singapore International Foundation (SIF). Program tersebut berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana untuk memperluas akses informasi digital dan memperkuat budaya literasi masyarakat. Bantuan yang diberikan mencakup pengadaan sebuah mobil internet yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling berbasis teknologi, sehingga dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, bantuan lainnya meliputi sumbangan 2.000 buku sebagai upaya memperluas akses literasi konvensional, instalasi jaringan internet untuk meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah, serta penyediaan perangkat digital seperti komputer dan laptop yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Kerja sama yang terjalin antara SIF dan Pemerintah DI Yogyakarta sejalan dengan prinsip paradiplomasi yang mencakup peran aktif entitas non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan aktor lokal, dalam menjalin hubungan internasional yang mendukung pembangunan di tingkat lokal. Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan oleh SIF bukan hanya bertujuan untuk mentransfer teknologi atau berbagi pengetahuan, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di Yogyakarta, serta mendorong mereka menuju keberlanjutan sosial dan ekonomi. Upaya ini menjadi bagian integral dari paradigma pembangunan yang lebih luas, di mana SIF, sebagai aktor paradiplomatik, berkontribusi dalam memperluas jaringan internasional yang saling menguntungkan, serta memperkuat konektivitas antara Indonesia dan Singapura. Secara lebih luas, SIF memainkan peran penting dalam mendukung agenda pembangunan lokal, menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, dan memperkuat hubungan antarnegara melalui kolaborasi yang berbasis pada kebutuhan serta potensi daerah.

Pada Skripsi berjudul Praktik “Paradiplomasi Dalam Sektor Budaya: Studi Kasus Kerja Sama Sister Province Pemerintah Daerah Di Yogyakarta dan Prefektur Kyoto” menjelaskan kerja sama *Sister Province* yang dilakukan pemerintah Yogyakarta dengan prefektur Kyoto untuk mempromosikan kebudayaan dan perluasan jaringan internasionalnya. Penelitian tersebut kemudian mengkaji dinamika kerja sama tersebut dari perspektif Kuznetsov. Selanjutnya, artikel “*Streamlining Non-Governmental Organization Programs towards Achieving the Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework*” oleh Mohamad Hasan, Khai Lee, dan Mazlin Mochtar, menekankan peran NGO sebagai aktor utama dalam

pencapaian *SDGs*. Artikel ini menawarkan kerangka kerja konseptual yang mencakup kemitraan lintas sektor dan perluasan nilai sosial untuk menyederhanakan program-program demi mencapai *SDGs*. Pendekatan terintegrasi ini menghubungkan berbagai aspek penting, memungkinkan NGO mengembangkan program yang holistik, akuntabel, dan berkelanjutan di masyarakat.

Kedua literatur tersebut menggaris bawahi peran penting aktor Sub-Negara dalam memfasilitasi kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan global, khususnya di bidang literasi digital. Dalam hal ini, SIF menjadi contoh bagaimana sebuah NGO dapat berkontribusi secara signifikan terhadap transformasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan literasi digital di komunitas-komunitas lokal.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dampak dari kerja sama antara pemerintah DI Yogyakarta dan SIF pada masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha memahami bagaimana SIF bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan digital, serta dampak program SIF terhadap peningkatan literasi digital terhadap masyarakat. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas paradiplomasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial dan teknologi di negara berkembang, Fokus pada kerja sama dengan organisasi *Singapore International Foundation* dan kontribusinya terhadap literasi digital di masyarakat belum banyak diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai paradiplomasi antara aktor non-negara, khususnya pemerintah Daerah Yogyakarta

dan NGO *Singapore International Foundation*, dalam memajukan literasi digital sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah fokus pada mengkaji bagaimana kerja sama antara SIF dan Pemerintah DI Yogyakarta mencerminkan peran paradiplomasi serta dampak dari kerja sama tersebut terhadap masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kerja sama antara Singapore International Foundation (SIF) dan Pemerintah DI Yogyakarta ?
- 2) Bagaimana kerja sama ini berkontribusi pada upaya peningkatan literasi digital di DI Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Menganalisis peran Singapore International Foundation (SIF) dalam mendukung pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pendekatan paradiplomasi untuk meningkatkan literasi digital.

b) Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama antara Singapore International Foundation (SIF) dan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks paradiplomasi untuk mendukung pengembangan literasi digital.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Bagi Penulis: Penelitian ini berfungsi untuk memperluas pemahaman mengenai peran paradiplomasi dalam memperkuat kerja sama antara aktor internasional dan lokal, khususnya dalam pengembangan literasi digital yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

b) Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik pada studi tentang paradiplomasi dan kolaborasi internasional dalam konteks pembangunan kapasitas masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai peran kerja sama lintas aktor dalam meningkatkan akses teknologi dan literasi digital di negara berkembang.

Dengan fokus pada paradiplomasi dan manfaatnya bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dalam memahami kolaborasi antara organisasi internasional dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan literasi digital.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir dalam penelitian ini memberikan gambaran umum tentang pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data guna menghasilkan kesimpulan yang relevan dan bermakna. Penelitian ini menjelaskan bagaimana organisasi internasional, seperti Singapore International Foundation (SIF), dapat membangun kerja sama strategis dengan pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan isu-isu sosial di masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dampak dari kolaborasi tersebut dalam meningkatkan literasi digital sebagai bagian dari inisiatif memperkuat pendidikan dan keterampilan digital di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan transfer pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik yang disesuaikan dengan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual



1. Literasi Digital

Sugiarto (2023) mengartikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk menggunakan, mengevaluasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan digital. Ini mencakup pengetahuan teknologi, keterampilan digital, perilaku bertanggung jawab di media online, serta kesadaran etika dalam penggunaan teknologi. UNESCO menjelaskan Literasi digital, yang lebih dari sekadar kemampuan mengoperasikan komputer, namun juga mencakup berbagai keterampilan dasar yang sangat penting. Keterampilan tersebut antara lain meliputi penggunaan dan produksi media digital, pengolahan serta pencarian informasi, partisipasi dalam jaringan sosial untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan, serta keterampilan komputasi profesional. Literasi digital dapat berfungsi sebagai katalisator yang memfasilitasi penguasaan keterampilan hidup lainnya yang sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga literasi digital juga disebut sebagai Life Skill. Literasi digital sebagai life skill juga mencakup keterampilan sosial, yaitu kemampuan mempelajari dan mengadopsi cara berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif sebagai literasi digital (UNESCO, 2024).

Konsep literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam bidang Pendidikan yang telah diakui secara global. Hal ini tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2030, khususnya dalam Goals 4 mengenai pendidikan berkualitas, yang bertujuan untuk memastikan akses yang inklusif dan adil terhadap pendidikan berkualitas serta mendorong peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua (Lia

Tasliah et al., 2024). Tujuan keempat ini menjadi salah satu sektor prioritas yang difokuskan oleh Singapore International Foundation dalam program-program pengembangannya. Fokus tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung pencapaian sektor pendidikan, pembangunan kapasitas, atau bidang lain yang relevan dengan kebutuhan global, khususnya yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Di banyak negara, sistem pendidikan formal sering kali belum mampu menjangkau seluruh segmen masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan literasi digital, individu dapat memanfaatkan platform e-learning dan sumber daya online untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru kapan saja dan dimana saja (Senja Shafira et al., 2024). Pentingnya literasi digital tersebut tidak hanya dikarenakan tingginya terpaan teknologi informasi saja, melainkan adanya faktor lain seperti peran penting informasi dalam proses demokrasi. Kemudian, peran penting partisipasi budaya dan kewarganegaraan. serta, berkembangnya budaya populer membuat anak dan remaja semakin banyak mengakses media digital (Koltay, 2011).

Di Indonesia, literasi digital telah menjadi prioritas nasional. Isu ini bahkan diangkat pada presidensi Indonesia di acara G20 yang dilaksanakan pada tahun 2022 (Indonesia.go.id, 2022). Dengan pemaknaan bahwa literasi digital adalah sebuah konsep yang mengarah pada mediasi antara teknologi dengan pengguna atau user untuk mempraktikkan teknologi digital secara produktif, maka

gerakan peningkatan literasi digital pun dirancang dan diselenggarakan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak negatif dari dunia digital.

James Potter (2004) membagi konsep literasi digital menjadi tiga elemen yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterampilan (Skills):

- a) Keterampilan teknis: Meliputi kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat komputer, internet, dan berbagai aplikasi.
- b) Keterampilan mencari informasi: Meliputi kemampuan mencari, memilih, dan mengevaluasi informasi yang relevan dari berbagai sumber digital.
- c) Keterampilan komunikasi: Meliputi kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui media digital, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video.

2. Struktur Pengetahuan (Knowledge Structures):

- a) Memahami media: Memahami bagaimana media bekerja, bagaimana pesan disampaikan, dan bagaimana media dapat mempengaruhi kita.
- b) Mengenali bias: Mampu mengenali bias dalam informasi yang kita terima dan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi.

- c) Memahami budaya digital: Memahami budaya yang berkembang di dunia digital, seperti norma, etika, dan tren yang berlaku.

3. Perhatian Pribadi (Personal Locus):

- a) Motivasi: Memiliki motivasi untuk belajar dan mengembangkan diri di dunia digital.
- b) Kreatif: Mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi digital.

Ketiga elemen ini membentuk dasar yang diperlukan untuk memahami dan beradaptasi dengan dunia digital yang semakin kompleks, serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat digital. Sehingga penelitian ini dapat memahami penggunaan konsep literasi digital untuk melihat adanya upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan berkelanjutan di wilayah DI Yogyakarta terutama untuk menganalisa program-program yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Singapore International Foundation yang memuat elemen-elemen tersebut.

2. International Non Governmental Organization

Dalam dua dekade terakhir, organisasi non-pemerintah (NGO) telah mengalami peningkatan pengaruh di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Kini, NGO dianggap sebagai aktor kunci dalam berbagai

inisiatif pembangunan, terutama di negara berkembang. Secara umum, NGO memainkan peran khusus dalam berbagai bidang kehidupan, seperti respons darurat, penguatan demokrasi, resolusi konflik, perlindungan hak asasi manusia, pelestarian budaya, aktivisme lingkungan, analisis kebijakan, penelitian, dan penyebaran informasi. Sebagai entitas yang berorientasi pada misi, NGO menjadi pilar penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Peter J. Spiro menggambarkan NGO sebagai entitas non-negara yang dibentuk secara sukarela oleh individu atau kelompok dan beroperasi secara independen dari kendali pemerintah. Sementara David Lewis dan Nazneen Kanji melihat NGO sebagai “Voluntary Associations” yang peduli terhadap perubahan lingkungan yang lebih baik. Secara umum, NGO bisa diartikan sebagai sebuah actor non negara yang berbentuk Lembaga, yang beroperasi tanpa tujuan untuk meraih keuntungan finansial, dengan fokus utama pada isu sosial dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

NGO memiliki variasi yang luas dalam hal struktur, mulai dari yang besar hingga kecil, formal hingga informal, serta birokratis hingga fleksibel. Dari sisi pendanaan, sebagian NGO mendapatkan dukungan finansial dari pihak eksternal, sementara yang lain mengandalkan sumber daya lokal. Beberapa NGO memiliki akses yang baik terhadap sumber daya dan beroperasi dengan nyaman, sedangkan yang lain berjuang untuk mempertahankan organisasinya dengan menjalankan aktivitas mereka dengan sangat terbatas dari tahun ke tahun. Dalam hal sumber daya

manusia, ada NGO yang dijalankan oleh staf profesional, tetapi ada pula yang bergantung pada relawan dan komunitas pendukung. Adanya variasi tersebut mencerminkan fleksibilitas dan keberagaman NGO dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan, tantangan, dan konteks yang berbeda, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan mereka di berbagai sektor.

Seiring dengan perkembangan aktivitas hubungan internasional, NGO mulai memegang peran krusial dalam hubungan tersebut, antara lain sebagai penghubung antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat umum. NGO berkontribusi melalui advokasi kebijakan, pengembangan norma internasional, serta penyediaan layanan lintas batas. Lebih lanjut, Spiro menyoroti peran signifikan NGO sebagai aktor non-negara yang semakin berpengaruh dalam membentuk kebijakan serta praktik internasional, yang menantang paradigma tradisional hubungan internasional yang berfokus pada negara. Sementara itu, David Lewis dan Nazneen Kanji dalam bukunya "Non-Governmental Organization and Development" mengelompokkan peran organisasi nonpemerintah (NGO) ke dalam tiga kategori utama, yaitu penyedia layanan atau pelaksana program (Service Delivery/Implementer), katalis perubahan (Catalysis), dan mitra kolaborasi (Partnership).

Pertama, peran NGO sebagai Service Delivery atau Implementer NGO melibatkan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat melalui berbagai program atau proyek yang dilaksanakan bersama pemerintah atau lembaga

donor. Layanan yang diberikan termasuk perawatan kesehatan, dukungan ekonomi, bantuan darurat, dan penyuluhan pertanian. NGO sering bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki layanan publik, terutama ketika kapasitas pemerintah terbatas. Selain itu, NGO juga menyelenggarakan pelatihan dan penelitian untuk memperkuat kapasitas berbagai pihak. Dilema utama dalam peran ini adalah apakah NGO hanya mengisi kekosongan layanan sementara pemerintah mampu mengelola sendiri, atau apakah NGO terus menjalankan peran ini melalui kontrak dengan pemerintah.

Kedua, Peran katalis dalam NGO mengacu pada kemampuan mereka untuk mendorong perubahan dengan menginspirasi dan mengubah cara berpikir aktor lain. NGO menjalankan peran ini melalui advokasi, inovasi, dan pengawasan. Dalam advokasi, NGO bekerja sama dengan pemerintah untuk mengubah paradigma dan meningkatkan efektivitas, serta berfungsi sebagai "Policy Entrepreneur" melalui tiga tahapan: Agenda Setting (penentuan isu dan prioritas), Policy Development (penyusunan alternatif kebijakan), dan Policy Implementation (pelaksanaan kebijakan). Inovasi juga menjadi kekuatan NGO, membantu masyarakat mengatasi masalah dan melobi pemerintah untuk mengadopsi solusi tersebut. Sebagai pengawas, NGO melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan dampak yang sesuai dengan tujuan.

Ketiga, peran partnership dalam NGO tercermin dalam kerja sama dengan berbagai aktor, termasuk pemerintah, donatur, dan sektor swasta, di

mana kedua pihak berbagi manfaat dan risiko. Kolaborasi ini membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi hanya dengan program atau kebijakan pemerintah. Selain itu, partnership juga melibatkan kerja sama dengan individu atau NGO lain untuk membangun program capacity building, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat kemampuan NGO atau masyarakat yang menjadi sasaran.

The Development Global Research Center juga membagi Jenis NGO menurut tingkat keberpartisipasiannya di tengah-tengah masyarakat. Pembagian tersebut yakni;

- a) NGO Sebagai Organisasi Amal (Charitable Orientation) yang berfokus pada kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu seperti mendistribusikan makanan, pakaian, atau obat-obatan.
- b) NGO sebagai Organisasi Layanan Hidup (Service Orientation) merupakan jenis NGO yang menyediakan layanan kesehatan, perencanaan keluarga, atau pendidikan, yang sangat mengharapkan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana maupun penerima manfaat layanan tersebut.
- c) NGO sebagai Organisasi Partisipasi Masyarakat (Participatory Orientation) yang ditandai dengan pembangunan proyek swadaya yang melibatkan masyarakat setempat, terutama dalam pelaksanaan proyek dengan menyumbangkan uang, alat, tanah, bahan, tenaga kerja.

d) Terakhir NGO sebagai Organisasi Pemberdayaan (Empowering Orientation) bertindak sebagai fasilitator dalam mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang ke masyarakat mengenai faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta memperkuat kesadaran mereka tentang potensi kekuatan mereka untuk mengendalikan hidup mereka sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Internasional merupakan aktor non negara yang memiliki peran krusial yang tidak bisa diabaikan dalam menangani isu-isu internasional. Organisasi internasional kemudian dapat dilihat berdasarkan levelnya, pada level institusi, organisasi internasional dapat berupa organisasi yang tidak terikat pada pemerintah (Non Governmental Organization). NGO sendiri telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam membantu pemerintah lokal dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada. Sehingga penelitian ini secara spesifik akan melihat apa saja kontribusi yang dilakukan oleh INGO Singapore International Foundation.

3. Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah non-sentral, seperti pemerintah daerah, kota, atau provinsi, dalam arena internasional (Alvarez, 2020). Lebih lanjut, Stefan Wolff melihat bahwa istilah ini mengacu pada kemampuan entitas sub-negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri secara mandiri, di mana mereka berperan aktif dalam masyarakat internasional tanpa bergantung pada

pemerintah pusat, demi memperjuangkan kepentingan internasional khusus mereka. Sehingga paradiplomasi muncul sebagai bentuk pelengkap diplomasi negara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Konsep ini melibatkan peran entitas subnasional yang, melalui pejabat terpilihnya, mewakili kepentingan masyarakat lokal di panggung internasional.

Hubungan internasional yang dijalin oleh aktor sub-nasional tidak hanya mencerminkan bentuk otonomi, tetapi juga menjadi sarana yang lebih efektif untuk mengakomodasi dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan regional yang mungkin berbeda dengan kepentingan nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa aktor-aktor daerah, seperti pemerintah daerah atau organisasi lokal, memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan potensi daerah mereka. Mereka lebih tahu tentang kebutuhan spesifik serta tantangan yang dihadapi oleh wilayah tersebut, yang sering kali tidak sepenuhnya dipahami atau diakomodasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, hubungan internasional yang dibangun oleh aktor sub-nasional dapat menawarkan solusi yang lebih cepat dan tepat untuk isu-isu regional, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam kancah global, tanpa mengabaikan keselarasan dengan kebijakan nasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang masalah yang terjadi di dunia nyata atas suatu fenomena sosial dan memiliki jawaban yang tak dapat dijelaskan dalam bentuk angka serta berfokus pada pertanyaan mengenai “bagaimana” dan “mengapa”(Tenny et al., 2022). Yang berarti penulis akan berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap peran dan dampak organisasi tersebut dalam masyarakat. Penelitian ini akan melibatkan analisis interaksi, kebijakan, serta program yang diterapkan oleh Singapore International Foundation (SIF) dalam konteks peningkatan literasi digital di Yogyakarta.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui media perantara atau pihak ketiga. Data primer biasanya berasal dari hasil wawancara, observasi, dan survei yang dikumpulkan dari pihak pertama (Sugiyono, 2018)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, video, dan sebagainya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh

melalui media cetak seperti buku maupun media elektronik seperti jurnal, situs web (website), buku elektronik (e-book), video daring, hingga postingan media sosial yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan pengamatan aktivitas penggunaan teknologi yang dalam hal ini yakni platform digital maupun media sosial. Selain itu, data primer akan didapatkan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan para pemangku kepentingan, seperti perwakilan Singapore International Foundation (SIF), dan pihak pemerintah setempat, untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang peran SIF dan dampaknya terhadap literasi digital di Yogyakarta. Observasi partisipatif akan dilakukan selama pelaksanaan program literasi digital untuk mengamati langsung proses interaksi dan penerapan program di lapangan. Selain itu, analisis dokumen terhadap laporan program, kebijakan, serta bahan komunikasi SIF akan memberikan konteks tambahan dan bukti empiris mengenai kontribusi organisasi tersebut dalam peningkatan literasi digital di daerah tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dalam penelitian ini sebagai pendekatan utama untuk mengolah data. Teknik ini bertujuan untuk mengkaji

permasalahan dengan cara menguraikan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian mengaitkan fakta-fakta tersebut satu sama lain. Melalui proses ini, peneliti dapat membangun koneksi logis antara data yang ada, sehingga mampu menyusun argumen yang valid dan mendalam. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada pemaparan fakta secara terpisah, tetapi juga menekankan pada bagaimana hubungan antara fakta-fakta tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai isu yang sedang dikaji.

5. Tahapan Penelitian

Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang tersusun ke dalam lima bab, antara lain;

Bab 1, Pendahuluan, mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan topik tentang dampak kerja sama Singapore International Foundation (SIF) dengan Pemerintah Daerah DIY dalam peningkatan literasi digital. Selain itu, bab ini menguraikan batasan dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian kualitatif yang digunakan, dan sistematika penulisan secara keseluruhan. Pembahasan dalam bab ini memberikan landasan untuk memahami konteks kerja sama lintas negara dalam kerangka paradiplomasi serta bagaimana kolaborasi tersebut memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

Bab 2, Tinjauan Pustaka, berisi ulasan teoritis mengenai literasi digital, peran organisasi internasional dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta konsep paradiplomasi sebagai mekanisme kolaborasi antara aktor internasional dan lokal. Dalam bab ini, teori-teori terkait, seperti literasi digital, tata kelola global, dan paradiplomasi, dibahas untuk memperkuat landasan konseptual penelitian. Penelitian ini mengeksplorasi relevansi literasi digital sebagai bagian dari pembangunan kapasitas masyarakat dan peran SIF sebagai aktor dalam kolaborasi lintas negara untuk mencapai manfaat langsung kepada komunitas lokal.

Bab 3, Gambaran Umum, memaparkan profil Singapore International Foundation (SIF), termasuk sejarah, program unggulan, dan perannya sebagai aktor paradiplomasi di tingkat global. Penjelasan ini mencakup keterlibatan SIF dalam berbagai proyek di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini juga membahas kolaborasi SIF dengan pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah daerah, komunitas, dan institusi pendidikan, untuk mendukung program literasi digital. Pendekatan paradiplomasi yang diterapkan oleh SIF menunjukkan bagaimana kerja sama lintas sektor memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, seperti peningkatan keterampilan digital dan akses teknologi.

Bab 4, Analisis dan Hasil Penelitian, menguraikan hasil analisis data kualitatif dari wawancara dan studi dokumen. Analisis mencakup pelaksanaan program literasi digital oleh SIF di Yogyakarta, tantangan yang dihadapi, serta dampak sosial yang dihasilkan. Dalam konteks

paradiplomasi, bab ini membahas bagaimana kerja sama tersebut memperkuat hubungan internasional pada tingkat lokal sekaligus memberikan manfaat langsung, seperti pemberdayaan komunitas dan peningkatan akses terhadap teknologi. Temuan penelitian ini dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk menilai efektivitas kolaborasi lintas sektor.

Bab 5, Kesimpulan dan Saran, menyajikan ringkasan hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan mencerminkan kontribusi SIF dalam peningkatan literasi digital di Yogyakarta melalui pendekatan paradiplomasi yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, saran yang diberikan mencakup pengembangan program literasi digital yang lebih inklusif dan strategis untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi paradiplomasi sebagai alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu merupakan aktivitas penting yang bertujuan membandingkan studi yang sedang dikerjakan oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini membantu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terkini dengan studi-studi sebelumnya, baik dari segi pendekatan, metode, maupun hasil yang dicapai. Dengan melakukan perbandingan ini, peneliti dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan penelitian sebelumnya, sehingga memberikan wawasan yang lebih jelas untuk memperkuat landasan teoretis, memperbaiki metode, atau menemukan celah penelitian yang dapat diisi. Hasil dari analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk menunjukkan kontribusi orisinal dari penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga berperan sebagai pijakan penting untuk memperkuat argumen dan validitas dari penelitian yang sedang berlangsung.

Penelitian yang berjudul "Praktik Paradiplomasi dalam Implementasi Kerja Sama *Smart City* Pemerintah Kota Bandung dan Kota Seoul" mengkaji konsep paradiplomasi dalam hubungan kerja sama antar pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pengembangan *smart city*. Studi ini juga membahas peran konsep *policy transfer* dan *policy diffusion* dalam mendukung implementasi kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Seoul.

Dalam kerja sama tersebut, *Knowledge Sharing Program (KSP)*, yang berada di bawah naungan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan, memiliki peran strategis sebagai aktor utama dalam advokasi kebijakan serta transfer teknologi terkait smart city. Dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan, penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama antara Bandung dan Seoul tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan bentuk konkret dari praktik paradiplomasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknologi dan tata kelola perkotaan. Paradiplomasi dalam konteks ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menjalin kerja sama strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan jangka panjang.

Penelitian kedua yang menjadi acuan dalam kajian ini adalah skripsi berjudul “Praktik Paradiplomasi dalam Sektor Budaya: Studi Kasus Kerja Sama Sister Province Pemerintah Daerah di Yogyakarta dan Prefektur Kyoto”. Skripsi tersebut membahas konsep paradiplomasi dalam hubungan internasional serta implementasinya dalam kerja sama antara Yogyakarta dan Kyoto. Paradiplomasi dipandang sebagai upaya pemenuhan kepentingan daerah melalui kerja sama yang didasarkan pada kesamaan visi dan misi. Dalam konteks ini, demokrasi berperan sebagai faktor utama yang mendorong praktik paradiplomasi, karena memberikan pendekatan yang lebih damai dalam penyelesaian isu-isu internasional. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah pusat dalam mendukung optimalisasi kerja sama melalui kebijakan yang relevan.

Meskipun kerja sama antara Yogyakarta dan Kyoto telah terjalin dalam jangka waktu yang panjang, aspek institusionalisasi dalam kerja sama tersebut masih

belum banyak mendapat perhatian dalam kajian akademik. Oleh karena itu, skripsi ini berfokus pada analisis proses institusionalisasi paradiplomasi dalam kerja sama tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait efektivitas serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerja sama antar daerah di sektor budaya.

Terakhir, Artikel berjudul “ Paradiplomasi dalam Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Melalui Program Power to Youth (PtY) 2021-2023” membahas konsep kerja sama diplomasi antara pemerintah daerah dan organisasi internasional dalam mengatasi ketimpangan gender. Artikel ini menyoroti Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan Rutgers WPF Indonesia dalam program Power to Youth (PtY). Paradiplomasi ini dikategorikan sebagai paradiplomasi lapis kedua, yang berfokus pada kerja sama sosial dan kesehatan.

Dalam kajian teoritisnya, artikel ini merujuk pada pemikiran Kuznetsov dan Tavares mengenai berbagai bentuk paradiplomasi, di mana paradiplomasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya dengan pemerintah daerah asing, tetapi juga dengan International Non-Governmental Organizations (INGOs). Rutgers WPF sebagai organisasi internasional non-pemerintah berperan dalam advokasi hak kesehatan seksual dan reproduksi serta kesetaraan gender. Isu ketimpangan gender di Jember dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, pernikahan anak, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi. Sehingga kerja sama paradiplomasi antara Kabupaten Jember dan

Rutgers WPF bertujuan untuk mengatasi permasalahan ini melalui edukasi, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan pemuda dan kaum muda.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Fokus	Perbedaan
1	Renny Candradewi Puspitarini, Fahrisyah Tiko Septiarika, Randy Bramastya	Praktik Paradiplomasi Dalam Implementasi Kerja Sama <i>Smart City</i> Pemerintah Kota Bandung Dan Kota Seoul	Analisis praktik paradiplomasi melalui kerja sama antar kota (Bandung–Seoul) dalam pengembangan <i>smart city</i> ; mengkaji peran <i>Knowledge Sharing Program</i> (KSP) Korea Selatan	-Kajian pustaka tersebut meneliti pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah kota Tokyo sebagai aktor paradiplomasi sedangkan penelitian ini akan meneliti International Non Governmental Organization

				dan Pemerintah DI Yogyakarta sebagai aktor paradplomasi.
2	Novera Amalya Cinta	Praktik Paradiplomasi Dalam Sektor Budaya: Studi Kasus Kerja Sama Sister Province Pemerintah Daerah Di Yogyakarta Dan Prefektur Kyoto	Menganalisis kerja sama budaya antara Yogyakarta dan Kyoto melalui mekanisme sister province; fokus pada proses institusionalisasi dan dukungan kebijakan pemerintah pusat	-Penelitian tersebut berfokus pada kerja sama paradiplomasi di bidang budaya sementara penelitian ini berfokus pada bidang pendidikan (Literasi Digital) -Terdapat perbedaan

				aktor paradiplomasi
3	Khurin Kedhaton, Muhammad Fadzryl Adzmy	Paradiplomasi Dalam Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember Dan Rutgers Wpf Melalui Program Power To Youth (Pty) 2021-2023	Meneliti bentuk paradiplomasi lapis kedua antara daerah dan NGO internasional dalam isu kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi	- Penelitian tersebut berfokus pada isu kesetaraan gender sementara penelitian ini berfokus pada pengembangan literasi digital masyarakat. - Meskipun sama-sama meneliti kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan INGO, terdapat

				perbedaan Subjek INGO dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
--	--	--	--	---

A. International Non Governmental Organization (INGO)

Perkembangan dunia yang begitu pesat sebagai dampak dari adanya globalisasi menimbulkan banyak permasalahan global. Akibatnya, muncul berbagai aktor-aktor baru yang turut mengambil bagian bersama dengan negara-negara dalam sistem internasional. Aktor-aktor negara dan non-negara telah mencoba memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam proses globalisasi. Salah satu aktor non-negara adalah Organisasi Internasional. Organisasi Internasional merupakan aktor dinamis dalam tata kelola sosial secara global. Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintahan dan non-pemerintahan) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggota (Clive Archer).

Organisasi internasional merupakan salah satu bagian penting dari politik dunia. Organisasi internasional menetapkan norma dan standar, merumuskan dan menerapkan hukum internasional, membantu negara-negara yang gagal,

berkontribusi untuk menyelesaikan konflik, dan membantu memastikan ketahanan pangan bagi jutaan orang. Organisasi ini muncul karena adanya kebutuhan akan kerja sama seiring dengan pesatnya perkembangan sosial, sehingga ketergantungan terhadap orang lain semakin meningkat, baik dalam masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Masalah-masalah umum yang membutuhkan tindakan bersama ini pertama kali dirasakan di bidang non-politik. Pada awalnya, organisasi internasional didirikan untuk memenuhi kebutuhan kerja sama selama masa revolusi industri (Carissa, Auroria, & Putri, 2024). Teuku May Rudy menyatakan secara terinci penggolongan organisasi internasional menurut kegiatan administrasi, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi internasional antar pemerintahan (Inter Governmental Organization) yang sering lazim disingkat menjadi IGO. Anggota-anggotanya adalah pemerintah, atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.
2. Organisasi Internasional Non Pemerintah (Non Governmental Organization) yang sering juga lazim disingkat dengan peristilahan NGO, atau INGO (International Non Governmental Organization). Kegiatan administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata (Rudy, 2009 : 5).

Diferensiasi utama antara berbagai jenis organisasi ini didasarkan pada keterlibatan pemerintah dalam pengelolaannya serta lingkup operasionalnya. Bergantung pada apakah mereka dijalankan oleh pemerintah (IGO) atau tidak (LSM, INGO) dan apakah mereka bersifat internasional (IGO, INGO) atau tidak (LSM) (Sigwatch, 2024). Sehingga dalam mengidentifikasi *International Non-Governmental Organizations* (INGOs), *Yearbook of International Organizations* menetapkan beberapa kriteria utama yang mencakup tujuan, keanggotaan, struktur, pendanaan, dan otonomi. Tujuan dari sebuah INGO harus bersifat internasional dan tidak terbatas pada kepentingan satu negara tertentu. Keanggotaan organisasi ini harus mencakup individu atau kelompok dari berbagai negara, berbeda dengan NGO nasional yang hanya beroperasi dalam satu wilayah negara. Struktur INGO biasanya memiliki jaringan yang luas dengan kantor pusat dan cabang di berbagai negara untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka. Dalam aspek pendanaan, INGO sering kali memperoleh sumber daya dari donor internasional, hibah pemerintah asing, maupun sumbangan masyarakat global, yang membedakannya dari NGO nasional yang lebih mengandalkan dana domestik. Sementara itu, otonomi menjadi faktor penting dalam membedakan INGO dari organisasi internasional lainnya, seperti Intergovernmental Organizations (IGOs), karena INGO harus tetap independen dari kendali langsung pemerintah (*Union of International Associations*, n.d.)

Kriteria persyaratan bagi organisasi internasional non-pemerintah (INGO), menurut “*The Union of International Associations*”, adalah:

1. Tujuan organisasi harus sepenuhnya bersifat/berciri internasional, dengan menegaskan keterlibatan organisasi lebih daripada sekedar hubungan bilateral (antara dua negara), atau sekurang-kurangnya mencakup kegiatan organisasi pada 3 (tiga) negara.
2. Keanggotaannya harus terbuka, mencakup individu-individu serta kelompok- kelompok di wilayah/negara yang termasuk ruang lingkup organisasi tersebut, dengan sekurang-kurangnya mencakup individu atau kelompok dari 3 (tiga) negara.
3. Anggaran dasar organisasi harus mengandung ketentuan mengenai pemilihan/pergantian pimpinan dan pengurus secara berkala/periodik, dengan tata cara pemilihan yang disusun sedemikian rupa menghindari pengisian jabatan-jabatan dan pengendalian organisasi hanya orang-orang dari satu negara saja.
4. Pendanaan/pembiayaan pokok (substansial) bagi kegiatan organisasi harus berasal, atau mencakup sumbangan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara.

Pendekatan Kjell Skjelsbaek (1971) memberikan perspektif lain dalam membedakan INGO dengan organisasi lainnya berdasarkan tingkat keterlibatan pemerintah. Menurutnya, INGO idealnya bersifat independen dan tidak boleh berada di bawah kendali langsung pemerintah mana pun. Namun, dalam praktiknya, banyak INGO yang memiliki anggota dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, menciptakan kompleksitas dalam menentukan sejauh

mana organisasi tersebut tetap independen. Oleh karena itu, Skjelsbaek menekankan bahwa agar suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai INGO, minimal harus memiliki keterwakilan dari dua negara berbeda, dan salah satu perwakilan tersebut tidak boleh merupakan agen pemerintah. Dengan demikian, identifikasi INGO tidak hanya bergantung pada aspek administratif dan operasional, tetapi juga pada tingkat independensi dan keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah dalam struktur organisasinya.

International Non-Governmental Organizations (INGOs) memainkan peran penting dalam tata kelola global dengan menjembatani kerja sama antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal. Tercatat banyak INGO bermitra dengan organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa dalam menjalankan berbagai proyek sosial, kemanusiaan, dan lingkungan (UIA, 2021). Organisasi ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui jaringan global dan sumber daya yang mereka miliki, INGO dapat berfungsi sebagai fasilitator antara kebijakan internasional dan implementasi di tingkat lokal, memastikan bahwa target SDGs dapat dicapai secara efektif di berbagai negara, terutama di wilayah berkembang (UIA, 2021). Banyak INGO yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, pelatihan, serta advokasi kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. Sebagai contoh, kerja sama antara INGO

seperti Oxfam dan Save the Children dengan pemerintah daerah di berbagai negara telah menghasilkan program peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pendidikan dan ketahanan pangan (Smith, 2010).

Selain itu, INGO juga membantu memperkuat institusi lokal dengan memberikan pelatihan dalam tata kelola yang transparan dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dalam jangka panjang. (Aldecoa & Keating, 1999, p. 45) menjelaskan bahwa INGO sering kali bertindak sebagai fasilitator dalam kerja sama antar daerah dan organisasi internasional, memungkinkan terjadinya pertukaran keahlian, sumber daya, serta pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan. Contoh konkret dari peran ini dapat dilihat dalam kerja sama INGO dengan kota-kota di negara berkembang dalam program pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan literasi digital dan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal (Lecours, 2008).

INGO berperan aktor paradiplomasi yang menghubungkan pemerintah daerah dengan komunitas global. Paradiplomasi merupakan keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan organisasi non-negara seperti INGO. Paradiplomasi dalam dimensi ketatanegaraan juga menelusuri jenis-jenis kewenangan yang dapat didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam urusan politik luar negeri (Andono, Surwandono dan Ali, 2020). Hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah regulasi dan kebijakan domestik yang sering kali membatasi ruang gerak INGO. Beberapa negara menerapkan regulasi ketat terkait pendaftaran, operasional,

serta aliran pendanaan INGO untuk mengontrol dampak sosial dan politik yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, dalam beberapa kasus, pemerintah nasional memandang INGO sebagai pesaing dalam penyediaan layanan publik atau bahkan sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, terutama jika mereka terlibat dalam advokasi hak asasi manusia dan transparansi pemerintahan (Smith, 2010). Tantangan lainnya termasuk persyaratan administrasi yang kompleks, ketergantungan terhadap donor internasional, serta ketidakseimbangan kekuatan dalam kerja sama dengan aktor negara yang sering kali memiliki otoritas lebih besar (Lecours, 2008).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat banyak contoh keberhasilan kerja sama antara INGO dan pemerintah, khususnya di negara berkembang. Sebagai contoh, Program Literasi INGO Room to Read dan Pemerintah Nigeria. Room to Read merupakan sebuah organisasi internasional yang fokus pada literasi dan pendidikan anak perempuan, bekerja sama dengan pemerintah Nigeria, berhasil meningkatkan literasi di kalangan anak-anak, khususnya di daerah pedesaan. Melalui program ini, Room to Read membantu membangun perpustakaan sekolah, menyediakan buku bacaan, dan melatih guru dalam metode pengajaran literasi yang efektif. Namun, dalam beberapa kasus, hambatan seperti perubahan kebijakan pemerintah, instabilitas politik, dan keterbatasan sumber daya telah menghambat efektivitas program yang diinisiasi oleh INGO. Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama antara INGO dan pemerintah sangat bergantung pada faktor-faktor seperti transparansi, keselarasan visi, serta komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak.

Dengan demikian, hubungan antara INGO, pemerintah, dan lembaga internasional bersifat dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebijakan domestik, regulasi internasional, serta kondisi sosial-politik di negara tempat mereka beroperasi. Meskipun terdapat tantangan, kolaborasi yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan global dan

B. Paradiplomasi

Globalisasi telah membuka peluang interaksi dan transaksi yang lebih luas di antara berbagai aktor di dunia, termasuk aktor negara (*state actor*), sub-negara (*sub-state*), dan non-negara (*non-state actor*). Diplomasi di tingkat internasional bertujuan untuk memenuhi atau memperjuangkan kepentingan nasional (Stagnell, 2020). Lebih lanjut, diplomasi juga diarahkan untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dapat mencakup dan mendukung kebutuhan daerah-daerah di dalam wilayah Indonesia. Intensitas interaksi ini mencakup berbagai dimensi dan bidang, yang membuka peluang bagi aktor sub-negara, seperti pemerintah daerah, untuk menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri. Mitra tersebut dapat berupa pemerintah daerah asing, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, maupun individu.

Paradiplomasi pertama kali dibawakan oleh Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos pada sekitar 1980-an dalam artikel yang berjudul *The International Dimension of Sub-National Self Government* (Winatra, 2019). Menurut Duchacek dan Soldatos, paradiplomasi adalah suatu kegiatan dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh aktor sub-negara untuk mencapai

kepentingannya. Kemudian Saldatos menjelaskan lebih lanjut bahwa Paradiplomasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk desentralisasi kewenangan politik dan administrasi yang melibatkan aktor-aktor subnasional, institusi politik, serta kebijakan publik dalam menjalankan hubungan luar negeri. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berperan sebagai entitas yang secara nyata mengimplementasikan kebijakan publik di tingkat lokal, termasuk dalam aspek kerja sama internasional. Tren paradiplomasi ini memberikan peluang baru bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya internasional, multinasional, atau transnasional secara lebih proporsional. Fenomena ini menjadi bagian dari kritik terhadap dominasi negara-bangsa (nation-state) dan membuka ruang diskusi tentang partisipasi aktor sub-negara serta pemerintahan sub-nasional yang sebelumnya terpinggirkan.

Saldatos (1990) juga mengungkapkan bahwa Paradiplomasi, atau keterlibatan pemerintah subnasional dalam hubungan internasional, mencerminkan dinamika baru dalam politik global. Meskipun aktivitas ini dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri nasional, masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemerintah subnasional telah benar-benar bertransformasi menjadi aktor internasional yang independen. Namun, terlihat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan peran entitas subnasional dalam hubungan internasional.

1. Pertama, negara asing dan perwakilan diplomatik mereka semakin memperhatikan serta merespons kebijakan daerah yang memiliki implikasi internasional.
2. Kedua, pemerintah daerah kerap menjadi sasaran lobi atau intervensi dari aktor asing, baik dalam bentuk diplomasi langsung maupun kerja sama teknis.
3. Ketiga, perusahaan multinasional memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat negara bagian atau provinsi guna melindungi dan memperluas kepentingan bisnis mereka.
4. Keempat, media internasional sering meliput kebijakan atau tindakan politik yang diambil oleh pemerintah subnasional, sehingga meningkatkan eksposur mereka di panggung global.

Konsep paradiplomasi mengalami perkembangan dari micro-diplomacy hingga multi-level governance. Pada awalnya, micro-diplomacy berfokus pada interaksi terbatas antara pemerintah daerah dan aktor asing dalam skala kecil, seperti pertukaran budaya dan kerja sama kota kembar (sister city). Namun, seiring dengan meningkatnya globalisasi dan desentralisasi, paradiplomasi berkembang menjadi pendekatan multi-level governance, di mana pemerintah daerah berpartisipasi lebih aktif dalam diplomasi internasional dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Keating, 1999).

Beberapa faktor utama yang mendorong perkembangan praktik paradiplomasi adalah globalisasi dan desentralisasi (Martinez, 2017). Globalisasi telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan internasional secara lebih luas, terutama dalam sektor perdagangan, investasi, dan teknologi. Pemerintah subnasional telah muncul sebagai aktor internasional yang relevan di era globalisasi. Mereka semakin memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait agenda internasional, berpartisipasi dalam berbagai organisasi transnasional bersama mitra mereka di luar negeri, yang mengarah pada tata kelola global dan regional. Di sisi lain, desentralisasi yang diterapkan di banyak negara telah memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan luar negeri dalam kapasitas tertentu (Lecours, 2008). Pemerintahan yang terdesentralisasi, jika direncanakan dengan matang, diimplementasikan secara efektif, dan dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal serta memperkuat pembangunan manusia secara keseluruhan, meskipun bukan merupakan solusi instan bagi semua permasalahan pemerintahan (UNDP, 2004: 2). Namun, desentralisasi politik tidak selalu menjamin tata kelola yang lebih baik, terutama di negara-negara dengan demokrasi yang belum matang dan masih menghadapi praktik otoritarianisme di tingkat subnasional, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan dan pemerintahan secara keseluruhan.

Paradiplomasi sendiri dapat dikatakan merupakan pendekatan yang baru dalam ilmu hubungan internasional. Praktek paradiplomasi menerobos paham

sistem Westphalia yang wewenangnya bersifat sentralistik menjadi terdesentralisasi pada level sub-nasional, termasuk dalam urusan diplomasi (Mukti, 2015). Pada dasarnya, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu contohnya adalah kebutuhan dalam bidang sosial, yang dalam analisis kebijakan luar negeri sering kali dipandang sebagai urusan masyarakat (societal) yang kompleks, terpisah dari pemerintahan (governmental). Kompleksitas ini kerap menimbulkan penyederhanaan masalah ilmiah, termasuk dalam pembagian tanggung jawab untuk mencapai kepentingan nasional yang dipahami melalui teori diplomasi (Frankel, 1970). Sehingga praktik Paradiplomasi dinilai sebagai strategi pembangunan daerah dan diplomasi ekonomi. Pemerintah daerah menggunakan paradiplomasi untuk menarik investasi asing, meningkatkan pariwisata, serta memperluas jaringan perdagangan internasional. Sebagai contoh, Kota Québec telah sukses menerapkan paradiplomasi dengan New York City dengan membentuk Koridor perdagangan Québec–New York. Ini merupakan kawasan ekonomi bi-nasional yang terbentuk melalui kesepakatan antara jaringan bisnis terbesar di Québec, FCCQ, dan aliansi pengembangan bisnis utama di utara New York, PNCC (Murni & Saffanah, 2024).

Studi kasus awal tentang implementasi paradiplomasi banyak ditemukan di negara-negara dengan sistem desentralisasi tinggi, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Spanyol. Provinsi Québec, misalnya, telah mengembangkan kebijakan paradiplomasi sendiri dengan membuka perwakilan di berbagai negara dan menjalin hubungan ekonomi langsung dengan pemerintah asing. Di

Spanyol, wilayah Catalonia juga telah aktif dalam paradiplomasi dengan mendirikan kantor perdagangan dan kebudayaan di luar negeri untuk memperkuat hubungan internasionalnya secara independen dari pemerintah pusat Spanyol (Lecours, 2008). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa paradiplomasi dapat menjadi alat yang efektif bagi pemerintah daerah untuk memperluas peran mereka dalam hubungan internasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama global yang lebih luas.

Keating (1999) mengidentifikasi tiga bentuk utama paradiplomasi, yaitu paradiplomasi transborder, transregional, dan global. Masing-masing bentuk ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat berinteraksi dengan aktor internasional dalam berbagai konteks, mulai dari kerja sama ekonomi hingga advokasi isu-isu global.

1. Paradiplomasi Transborder

Paradiplomasi transborder mengacu pada kerja sama antara daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah di negara lain. Bentuk paradiplomasi ini sering kali berfokus pada pengelolaan sumber daya bersama, pembangunan infrastruktur lintas batas, dan peningkatan perdagangan regional. Sebagai contoh, kerja sama antara negara bagian Texas di Amerika Serikat dengan negara bagian Chihuahua di Meksiko dalam pengelolaan perbatasan dan pembangunan ekonomi kawasan telah menjadi model yang sukses dalam paradiplomasi transborder (Duchacek, 1990). Bentuk kerja sama ini juga banyak ditemukan di Uni Eropa, di mana kota-kota di

perbatasan negara anggota sering kali bekerja sama dalam bidang transportasi, keamanan, dan pariwisata.

2. Paradiplomasi Transregional

Paradiplomasi transregional melibatkan kolaborasi antara daerah dari negara yang berbeda tanpa harus memiliki batas geografis langsung. Biasanya, kerja sama ini terjadi dalam bentuk aliansi kota, kemitraan ekonomi, atau kerja sama di sektor tertentu, seperti pendidikan dan teknologi. Salah satu contoh paradiplomasi transregional adalah Sister Cities International, yang menghubungkan kota-kota di berbagai negara untuk memperkuat hubungan budaya dan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah di negara-negara berkembang juga sering menjalin kerja sama dengan daerah di negara maju untuk berbagi teknologi dan pengalaman dalam pembangunan perkotaan (Keating, 1999).

3. Paradiplomasi Global

Paradiplomasi Global merujuk pada keterlibatan pemerintah daerah dalam isu-isu global yang melampaui kepentingan lokal dan nasional. Dalam bentuk ini, pemerintah daerah dapat berpartisipasi dalam forum internasional dan bekerja sama dengan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, serta *International Non-Governmental Organizations* (INGOs) untuk menangani isu-isu global, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Contoh nyata dari paradiplomasi global adalah partisipasi kota-kota besar, seperti New

York dan Paris, dalam jaringan C40 Cities Climate Leadership Group, yang bertujuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim di tingkat perkotaan (Lecours, 2008). Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mempromosikan hak-hak minoritas dan keberlanjutan sosial melalui kerja sama dengan organisasi internasional.

Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang otonomi daerah yang menyatakan bahwa daerah sebagai bagian sub-sistem dari Indonesia dan perpanjangan tangan pemerintah pusat berhak dan legal untuk mengurus daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensinya. Oleh sebab itu, dalam konsep tata pemerintahan daerah disebutkan bahwa otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri (Helmanida, 2011). Wewenang tersebut dimaksudkan supaya tercapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, yang menuju kepada tingkat kemandirian masyarakat daerah serta hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah (Suryaningrat, 1981).

Namun, peraturan-peraturan tentang otonomi daerah belum berbicara masalah teknis kerjasama yang bisa dilakukan oleh daerah. Dalam aturan lainnya untuk kembali melegalkan dan mempermudah dan menyaring diplomat-diplomat baru (paradiplomasi) ini munculah beberapa aturan hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Peraturan Menlu RI Nomor 09/A/KP/XII/2006, Permendag Nomor 3 Tahun 2008, Permendag

Nomor 74 Tahun 2012, merupakan sejumlah aturan teknis legal bagi pemerintah daerah walaupun tidak bisa secara langsung diimplementasikan karena harus melalui Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator hubungan luar negeri (open door policy), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta MPR (Fathun, 2016)

Akan tetapi, seberapapun besarnya wewenang pemerintah daerah yang diamanatkan oleh konstitusi tetap saja pemerintah daerah menjadi sub-sistem negara. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pelaku hubungan kerjasama internasional dalam bentuk investasi asing hanya bisa sampai pada panandatangan *MoU* atau *Letter of Intent*. Itu artinya dalam kesepakatan-kesepakatan perjanjian yang lebih tinggi seperti perjanjian, traktat, atau konvensi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan demikian sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengelola kerjasama luar negeri pemerintah pusat – dalam hal ini Kementrian Luar Negeri mempunyai wewenang untuk: memadukan seluruh potensi kerjasama daerah agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri; mencari terobosan baru (inisiator); menyediakan data yang diperlukan (informer); mencari mitra kerja di luar negeri; mempromosikan potensi daerah di luar negeri (promotor); memfasilitasi penyelenggaraan hubungan kerjasama luar negeri (fasilitator); dan memberi perlindungan kepada daerah (protector) (Arsyad dan Masrie, 2010:8).

Meskipun paradiplomasi semakin diakui sebagai bagian dari hubungan internasional, masih terdapat tantangan dan peluang dalam memperkuat perannya sebagai bagian dari diplomasi multilateral. Salah satu tantangan utama adalah

bagaimana memastikan bahwa kerja sama paradiplomasi tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri pemerintah pusat, terutama dalam sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis sering kali menjadi hambatan bagi daerah untuk mengembangkan hubungan internasional yang lebih luas. Namun, di sisi lain, meningkatnya keterlibatan organisasi internasional dan jaringan kota global, seperti *United Cities and Local Governments* (UCLG), menawarkan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih berperan dalam kebijakan global, terutama dalam isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan keberlanjutan perkotaan (Duchacek, 1990).

Dengan perkembangan teknologi, perubahan dinamika global, serta meningkatnya pengakuan terhadap peran pemerintah daerah dalam diplomasi internasional, paradiplomasi diperkirakan akan semakin berkembang di masa depan. Adaptasi terhadap tantangan dan pemanfaatan peluang yang ada akan menentukan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menggunakan paradiplomasi sebagai alat strategis untuk pembangunan dan diplomasi global.